

PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA (Studi Kasus di PWNU Jawa Barat dan Cendikiwan Nahdliyin)

(Diterima 20 Februari 2017; direvisi 10 April 2017; disetujui 30 April 2017)

Ridwan Fauzi¹

¹ Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Institut Teknologi Bandung
e-mail :

Abstrak

Nilai-nilai demokrasi jika tumbuh dan berkembang dalam perilaku keseharian warga negara maka akan mendorong perkembangan demokrasi yang mapan (*established democracy*). Sebaliknya, jika nilai-nilai tersebut tidak dikembangkan maka demokrasi berada dalam keadaan yang rentan (*fragile democracy*). Upaya pendidikan demokrasi salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan lingkungan masyarakat (*community based civic education*). Salah satunya adalah *Nahdlatul Ulama*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi, pendidikan demokrasi yang dilakukan, strategi dan metode yang digunakan dalam melakukan pendidikan demokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Karena metode ini dianggap cocok digunakan untuk menggali secara mendalam dan menganalisis fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa nilai-nilai demokrasi dalam perspektif NU yakni *tawazun* (serasi, selaras, seimbang), *tawassuth* (NU bersikap moderat tidak sebaliknya tathoruf/ekstrem), *tasamuh* (toleran), *i'tidal* (adil) dan kelima *amar'ma'ruf nahi munkar*. pelaksanaan Konferensi Wilayah Jawa Barat, *kedua* Pelatihan bagi pengurus cabang NU se Jawa Barat (TOT), *ketiga* *Bahtsul Masail* yang dilakukan PWNU, *keempat*, pengajian *Lailatul Ijtima*, *kelima*, kajian-kajian kekinian, *keenam*, menyuarakan antikorupsi, dan *ketujuh*, turut berperan dalam pesta demokrasi. Strategi yang digunakan NU dalam upaya pendidikan demokrasi ditempuh melalui strategi formal dan nonformal. Media yang digunakan dalam upaya pendidikan demokrasi melalui organ PWNU sendiri yang dibantu badan otonom dan lajnah dibawahnya, media internet dalam hal ini melalui website nu, dan penerbitan media cetak yakni pembuatan buku, penerjemahan untuk kemudian ditransformasikan masyarakat umum.

Kata Kunci : pendidikan demokrasi; nahdatul ulama.

PENDAHULUAN

Istilah demokrasi di dunia ini merupakan sebuah istilah yang familiar, karena berkaitan dengan keseharian kehidupan manusia baik berkaitan dengan pemerintahan maupun nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidaklah mengherankan sebab demokrasi telah dikenal sejak zaman Yunani kuno yang dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad ke-4 – abad ke-6 M (Winarno:2009:90). Demokrasi yang dipraktikkan pada saat itu berkaitan dengan struktur pemerintahan yakni dikenal dengan demokrasi *langsung* (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan –keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga Negara

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Winarno (2006:93), ia membagi pemaknaan demokrasi secara parsial ke dalam tiga bagian. *Pertama*, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Plato, Demokrasi adalah “bentuk pemerintahan yang dipegang dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak”. *Kedua*,

demokrasi sebagai sistem politik, sebagaimana Henri, B Mayo mendefinisikan bahwa “demokrasi adalah sistem politik yang dimana menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang diselenggarakan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”. *Ketiga*, demokrasi sebagai suatu sikap hidup, dimana demokrasi membutuhkan suatu sikap atau pandangan hidup yang dapat mendukung dalam jalannya demokrasi.

Melihat definisi-definisi di atas, sangatlah urgen untuk menyebarluaskan faham demokrasi yang ada di Indonesia (demokrasi Pancasila) sebab cita-cita luhur akan terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sependapat dengan Alexis De Tocqueville dalam Syaiful & Komala (2008:98) mengatakan bahwa “etos demokrasi adalah sesuatu yang dipelajari dan bukan diwariskan”. Artinya, demokrasi tidak hanya

difahami dalam tatanan kognitif saja, melainkan harus dipraktikkan dalam amal perbuatan masyarakat. Nilai-nilai demokrasi jika tumbuh dan berkembang dalam perilaku keseharian warga negara maka akan mendorong perkembangan demokrasi yang mapan (*established democracy*). Sebaliknya, jika nilai-nilai tersebut tidak dikembangkan maka demokrasi berada dalam keadaan yang rentan (*fragile democracy*).

Dalam sebuah negara demokrasi tentunya tidak diinginkan apabila suatu negara berada pada *fragile democracy* atau berada pada kerentanan. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan syarat hidupnya, yakni warga negara yang memiliki dan menegakan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu yang lama, berat dan sulit. Oleh karena itu, secara substantif berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat demokratis, *pendidikan demokrasi mutlak diperlukan*. Pendidikan Demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara.

Menurut Sapriya (2004) menegaskan bahwa “pendidikan demokrasi harus diupayakan melalui proses pembelajaran, baik melalui pendidikan di sekolah (*school based civic education*) maupun dalam pendidikan di lingkungan masyarakat (*community based civic education*)”. Pendidikan demokrasi di lingkungan masyarakat (*community based civic education*) di Indonesia salah satunya dilakukan oleh organisasi sosial-keagamaan. Salah satu organisasi tersebut adalah *Nahdhotul Ulama* (NU).

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Apa saja nilai-nilai menurut pandangan NU dalam mengkonseptualisasikan demokrasi?
2. Apa saja yang telah dilakukan NU dalam melakukan pendidikan demokrasi ?
3. Bagaimana strategi yang digunakan NU untuk mengembangkan warga negara demokratis diantara anggotanya dan komunitasnya secara luas?

4. Apa media yang dipakai NU dalam melakukan pendidikan demokrasi?

METODE PENELITIAN DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Berdasar permasalahan yang dikaji, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini maka dibutuhkan teknik penelitian yang baik. Teknik penelitian yang digunakan untuk menunjang metode studi kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi Partisipatif. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka.
2. Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable

yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto 1997:236).

3. Wawancara (interview) adalah “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg :2002 dalam Sugiyono :2009:231).

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu :

1. Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk menggolongkan, megarahkan hasil-hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dengan kata lain reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan

lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasi sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti (Nasution: 1996:129).

2. Penyajian data (*display data*) adalah mendisplaykan data kedalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya (Sugiyono 2009:249).
3. Verifikasi (*conclusion drawing*) adalah upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari ha;-hal penting. Kesimpulan ini dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah difahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian (Nasution : 1996:129)

Adapun lokasi dan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengurus Wilayah Nahdlotul Ulama Jawa Barat (PWNU), para cendikiawan muslim nahdiyini termasuk beberapa kyai nahdiyini. Sedangkan lokasi penelitian ini bertempat di Kantor PWNU Jawa Barat beralamat di jalan Terusan Galunggung No 9 Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Menurut Pandangan NU Dalam Mengkonseptualisasikan Demokrasi

Bahwa terciptanya NU Jawa Barat sebagai organisasi massa keagamaan yang mandiri dan mashlahat bagi umat serta senantiasa mengawal terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang lebih sejahtera, berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah. PWNU Jawa Barat sebagai organisasi massa keagamaan yang memiliki basis massa sangat banyak ini, berkeinginan melanjutkan peranannya dalam mendakwahkan ajaran islam Ahlus-sunnah waljama'ah di Jawa Barat sebagai visi utama yang mendasari tujuan-tujuan selanjutnya. Aspek kesejahteraan yang diinginkan bermakna masyarakat yang memiliki kecukupan secara spritual dan material. Aspek spritual ini yang paling memungkinkan PWNU Jabar dalam memperjuangkannya. Masyarakat adil sejatinya masyarakat yang dapat menempatkan posisinya sebagai individu maupun sosial dalam berkehidupan. Keadilan dan

kesejahteraan merupakan dua sisi yang saling berkaitan. Dari adil akan muncul kesejahteraan. Hal ini pula yang menjadi visi dari Nahdlatul Ulama. Aspek yang paling penting adalah terciptanya masyarakat yang demokratis. PWNU Jabar berkeinginan dalam mewujudkan masyarakatnya sebagai masyarakat yang mengaplikasikan nilai-nilai demokratis yang akan menunjang terhadap pembangunan masyarakat Jawa Barat sendiri bahkan masyarakat nasional.

Nilai-nilai demokrasi dalam pandangan NU tercermin dalam sikap kemasyarakatan NU yakni pertama *tawazun* (serasi, selaras, seimbang), kedua *tawassuth* (NU bersikap moderat tidak sebaliknya tathoruf/ekstrem), ketiga *tasamuh* (toleran), keempat *i'tidal* (adil) dan kelima *amar'ma'ruf nahi munkar*.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh warga NU tentang demokrasi, mereka memiliki pemahaman masing-masing terhadap konsepsi tersebut, hal tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan sudut pandang masing-masing, luasnya pengalaman atau pendidikan.

Demokrasi diartikan dalam dimensi proses politik untuk memilih suatu kepengurusan/sistem pemerintahan. Dalam hal ini yang terjadi adalah pemaknaan demokrasi dalam dimensi secara politik formal. Hal tersebut didasari dari pendapat yang dikemukakan oleh Levin dalam Fuad (2006:27), yang dimaksud politik formal adalah “pemberian hak suara, pemilihan umum dan partai politik”.

Demokrasi sebagai sikap menghargai, toleran dan kebebasan bertanggung jawab (*demokrasi prosedural/luas/proses partisipatif*). mendudukan term demokrasi dalam perspektif pemilihan yang didasari kebebasan warga negara, atau demokrasi secara luas. Pembagian klasifikasi demokrasi dalam arti luas tersebut disebabkan oleh pendapatnya yang mendudukan demokrasi sebagai cara hidup, keinginan hidup dalam toleransi. Sebagaimana Print dalam Fuad (2006:27) mendefinisikan demokrasi sebagai cara hidup, keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain. Apabila difahami secara seksama,

prinsip nilai-nilai kemasyarakatan yang dimiliki NU yang terangkum dalam *Fikrah Nahdliyah*, memiliki kesesuaian dengan 11 pilar demokrasi yang dikemukakan USIS. Hal ini menunjukkan bahwa NU telah mengajarkan nilai-nilai demokrasi sejak lama. Artinya, NU memposisikan diri sebagai organisasi yang menerima/nilai-nilai demokrasi.

Pandangan NU dalam kaitannya dengan demokrasi, NU merupakan sebuah organisasi yang menerima demokrasi tidaklah seperti organisasi lain yang menolak gagasan demokrasi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, NU menerima demokrasi dan Pancasila sebagai dasar Negara sebab Pancasila tidak sama sekali bertentangan dengan Islam. NU menerima pemimpin selama pemimpin tersebut baik dan tidak melanggar hak-hak seorang muslim dalam hal beragama. Secara historis bahwa awal berdirinya NU dengan motif faktor Aqidah dan Nasionalisme telah berperan sangat besar terhadap kemerdekaan di Indonesia. NU memposisikan diri untuk menjadikan Islam sebagai formalitas tetapi menjadikan umat beragama sebab NU

menyadari beragamnya SARA di Indonesia. Bahkan NU mendeklarasikan sebagai organisasi pertama yang mendukung Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan demokrasi sebagai sistem pemerintahan

Perlu kiranya bahwa gagasan demokrasi kepada masyarakat yakni melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah penyebarluasan faham demokrasi menurut NU kepada masyarakat secara luas. Upaya pendidikan demokrasi wajib dilakukan untuk menjadikan masyarakat mengetahui hak-haknya. Adapun dalam konteks ke NU an definisi hak-hak tersebut sebagaimana terangkum dalam *maqoshid asy'ariyah (hifzh ad-din / pemeliharaan agama, hifzh an-Nafs/pemeliharaan jiwa manusia, hifzh al-Aql/pemeliharaan akal, hifzh al-Mal/pemeliharaan harta, dan hifzh 'irdh wa an-nasl/pemeliharaan hak manusia.*

Tabel 1
Perbandingan Nilai Demokrasi

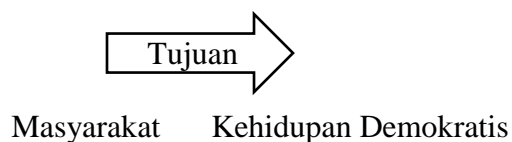
Nilai-nilai demokrasi (Dahl, 1991)	Nilai-nilai demokrasi (NU)
Contestation Participation Equality Freedom	Tawazun (seimbang, selaras, serasi) Tawwasuth (moderat) Tasamuh (toleran) I'tidal (adil) Amar makruf nahiy munkar

Sumber : Penulis

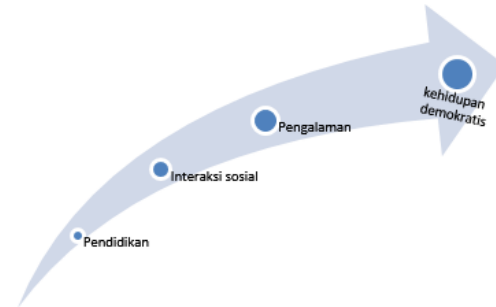
Upaya pendidikan demokrasi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui akan hak-haknya. Dalam konteks ke NU an definisi hak-hak tersebut sebagaimana terangkum dalam *maqoshid asy'ariyah* (*hifzh ad-din* / pemeliharaan agama, *hifz an-Nafs*/pemeliharaan jiwa manusia, *hifzh al-Aql*/pemeliharaan akal, *hifzh al-Mal*/pemeliharaan harta,dan *hifzh 'irdh wa an-nasl*/pemeliharaan hak manusia.

Gambar 1

Skema masyarakat dan kehidupan demokratis



Gambar 2
Urgensi pendidikan kaitannya dengan ketercapaian kehidupan demokratis



Kegiatan yang telah dilakukan NU dalam melakukan pendidikan demokrasi

Sebagai organisasi massa terbesar, NU sejatinya harus terus berupaya bagaimana caranya agar kader-kader NU mumpuni secara pengetahuan dalam berjuang mendakwahkan ajaran islam. Salah satu program PWNU untuk menunjang hal tersebut sekaligus sebagai dampak dari terlaksananya pendidikan demokrasi, PWNU menyelenggarakan pelatihan. Pelatihan (TOT) dimaksudkan untuk pengembangan segala aspek (keorganisasian, keagamaan & isu kontemporer) bagi para kader pengurus cabang se Jawa Barat. Tidak jarang dalam beberapa topiknya mengangkat isu-isu kajian

demokrasi, seperti kesetaraan gender, pluralisme, kebebasan individu, dll. Adapun dalam kegiatan tersebut diisi oleh orang yang ahli dibidangnya, hal tersebut menunjukkan bahwa NU bersikap terbuka dalam berkembangnya ilmu pengetahuan.

Bentuk pendidikan demokrasi selanjutnya yakni pelaksanaan bahtsul masail atau pembahasan permasalahan-permasalahan oleh Lembaga Bahtsul Masail yang dimiliki NU merupakan wadah berkumpulnya orang-orang nahdliyin tidak hanya Kyai, santri-santri muda pun berhak berpendapat, berargumen dalam memecahkan suatu permasalahan yang kompleks dan terkini. Pendapat Zamroni tersebut menerangkan kepada kita bahwasannya masyarakat demokratis mengedepankan nilai-nilai toleran, kerja sama dan kompromi untuk kebaikan masyarakat luas. Rupanya Bahtsul Masail tersebut senantiasa dalam praktiknya nilai yang dapat kita ambil adalah nilai *tawassuthiyah* (moderat), *tasamuhiyah* (toleransi), *tashawurriyah* (pola pikir musyawarah), *ishlahiyah* (reformatif) dan *tathowwuriyah* (dinamis)

sebagaimana sejalan dengan yang diungkapkan Zamroni. Dalam Bahtsul Masail yang dilakukan oleh NU tersebut memberikan bahwa PWNU sebagai organisasi yang senantiasa dalam kegiatannya mendasari nilai-nilai demokrasi.

Hal ini senada dengan pendapat Zamroni (2002:10) yang menyatakan bahwa “demokrasi yang didasarkan pada keyakinan akan martabat kehormatan setiap individu hanya akan berhasil apabila didampingi dengan pendidikan yang bertujuan mengembangkan manusia seutuhnya”. Salah satu program PWNU yang dapat dijadikan sebagai bentuk program pendidikan demokrasi selanjutnya adalah *lailatul ijtima*. Pengajian *lailatul ijtima* yakni pengajian yang dilakukan biasanya pada malam hari, adapun topik yang dibicarakan biasanya berisi masalah-masalah kontemporer masyarakat. Pengajian *Lailatul Ijtima* ini, memperkokoh eksistensi NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang konsisten terhadap pembentukan masyarakat yang madani (*civil society*). NU sebagai garda terdepan dalam menjadikan masyarakat

yang demokratis, yang berdiri sebagai pengayom kelas bawah. Komitmen ini sebagaimana dijelaskan Azizy dalam Suhaidi (2008 : 17) : Berangkat dari pemulihan khittah 1926, maka usaha yang akan dilakukan oleh NU tidak lagi meliputi bidang politik. Usahanya, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya, meliputi empat bidang, yaitu : (1) bidang agama, (2) bidang pendidikan, (3) bidang sosial, dan (4) bidang ekonomi (pasal 6 AD NU)

PWNU memiliki lembaga yang mengurus mengurus bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia yakni *Lakpesdam*. Lakpesdam melakukan berbagai kajian mengenai isu-isu kekinian termasuk gagasan demokrasi. LAKPESDAM). Lembaga ini merupakan lembaga yang konsen dalam hal melakukan distribusi demokrasi, dan yang rutin dilakukan adalah dengan cara melakukan kajian-kajian yang bersifat rutin. Pendapat Nurkholis Madjid tersebut, bahwa proporsi NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dapat turut berupaya mendukung upaya penegakan hukum dalam proporsinya

yakni ajaran yang dilakukan kepada warganya Adapun dalam Bahtsul Masail semua mempunyai hak yang sama dalam berpendapat tentang suatu permasalahan. Dari Bahtsul Masail tersebut memberikan contoh kepada kita bahwa NU telah sejak dahulu bagaimana menyebarkan gagasan demokrasi, nilai-nilai yang hendak di transformasikan, seperti kebebasan berpendapat, kesamaan hak, toleransi, penghargaan pendapat orang lain. Hal ini sependapat dengan Zamroni (2011:118) Selaku warga negara dalam sistem politik demokrasi, tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Antara lain, kewajiban dan tanggung jawab mempertahankan hak-hak politiknya.

Strategi yang digunakan NU untuk mengembangkan warga negara demokratis diantara anggota dan komunitasnya secara luas

Adapun dalam praktiknya untuk mengembangkan gagasan demokrasi atau pendidikan demokrasi secara luas, NU memiliki cara yang telah dilakukan. Dalam hal ini, cara yang dilakukan NU dalam mengembangkan

warga negara NU dan warga lainnya sebagai warga negara yang demokratis dilakukan dengan pendekatan ibadah dan budaya. Secara umum strategi yang dilakukan NU dalam menjadikan warga NU dan warga masyarakat lain agar menjadi warga negara yang demokratis, cara yang telah dilakukan dibagi menjadi dua, pertama *formal*, maksudnya adalah melalui program program NU secara berkesinambungan yang dilakukan oleh organisasi. Lalu, cara *nonformal*, maksudnya adalah cara yang dilakukan secara tidak formal dan terlembaga, seperti pendidikan di pesantren, teladan kyai dengan akhlak yang baik Sikap NU yang *washaton* atau kompromi terhadap berbagai kebudayaan yang berada di masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, menjadikan NU sebagai organisasi yang diterima dimasyarakat sehingga banyak pengikutnya, dibanding organisasi lain yang bersifat puritan yang justru menghilangkan kebudayaan yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran islam. Menurut Ali (2004: 115) berpendapat bahwa “ NU lekat dengan budaya Jawa, budaya yang di dalamnya orang-orang NU

lahir, akar sejarah inilah yang melahirkan pemotretan sosial adanya kerapatan, bahkan tak terpisahkan antara budaya Jawa dan eksistensi kaum Nahdhiyin”.

Media yang digunakan NU dalam melakukan pendidikan demokrasi

Dalam kaitannya dengan proses sosialisasi nilai-nilai demokrasi yang dilakukan Nahdhotul Ulama terhadap masyarakat, tentunya NU sendiri menggunakan media atau sarana yang membantu NU dalam melakukan pendidikan demokrasi. Adapun media tersebut adalah organisasi NU sendiri (PWNU Jawa Barat). PWNU sendiripun merupakan bagian dari media untuk melakukan pendidikan demokrasi kepada masyarakat. Sebagai contoh berbagai kegiatan yang telah dilakukan PWNU, seperti diskusi, seminar, musyawarah seperti halnya bentuk pendidikan demokrasi yang telah dibahas sebelumnya. Untuk menunjang kegiatan tersebut tentunya dibutuhkan sarana yang memadai.

Melihat kemajuan zaman yang sangat pesat seperti sekarang ini, NU berupaya untuk berinovasi dalam

penyebar luasan gagasan demokrasi , NU turut mengupayakan dalam menyebarkan gagasan demokrasi melalui teknologi internet. Sebagai terobosan baru, dalam hal ini PWNU Jawa Barat membuat website resmi PWNU Jawa Barat, yakni www.pwnujabar.com

Media selanjutnya yang digunakan PWNU dalam melakukan pendidikan demokrasi sebagaimana dalam hal ini WW menuturkan bahwa media lain yang digunakan melalui percetakan. PWNU Jawa Barat bekerja sama dengan penerbit dalam hal pembuatan buku. Sejumlah buku yang dibuat oleh para pemikir NU dan atau para pengurus NU dekade ini telah dibuat. Adapun yang terbaru yang telah diterbitkan dan di jual adalah “Bahaya Korupsi” (Pegangan Para Pendakwah), “Kumpulan Khotbah Basa Sunda” (Ulama NU Jawa Barat).

Adapun dalam melakukan pendidikan demokrasi adalah organisasi NU sendiri yang dimana dalam hal ini adalah PWNU. Secara struktural sebagai organisasi NU terbesar di Jawa Barat yang membawahi organisasi NU di

bawahnya. Dalam PWNU terdapat lembaga, Badan Otonom yang membantu melakukan pendidikan demokrasi secara teknis. Lembaga dan badan tersebut yang selama ini konsen dalam menyebarkan wawasan demokrasi adalah Lakpesdam (Lembaga pemberdayaan sumber daya manusia), LBM (Lembaga Bahtsul Masail), Muslimat NU, GP Anshor, Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Putri NU, Ikatan Sarjana NU, Persatuan Guru NU, Lembaga Dakwah NU, Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU.

Media dalam hal ini berperan sebagai institusi yang menjadi agen terlaksananya pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh PWNU. Dalam hal ini Menurut Sapriya (2004) menegaskan bahwa “pendidikan demokrasi harus diupayakan melalui proses pembelajaran, baik melalui pendidikan di sekolah (*school based civic education*) maupun dalam pendidikan di lingkungan masyarakat (*community based civic education*)”. PWNU termasuk sebagai pelaksana pendidikan demokrasi yang terjadi di

lingkungan masyarakat (*community based civic education*).

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun simpulan dalam penelitian ini bahwa

1. Nilai-nilai demokrasi dalam perspektif NU yakni *tawazun* (serasi, selaras, seimbang), *tawassuth* (NU bersikap moderat tidak sebaliknya tathoruf/ekstrem), *tasamuh* (toleran), *i'tidal* (adil) dan kelima *amar'ma'ruf nahi munkar*.
2. Kegiatan yang dilakukan NU dalam menumbuhkan pendidikan demokrasi diantaranya, pelaksanaan Konferensi Wilayah Jawa Barat *kedua* Pelatihan bagi pengurus cabang NU se Jawa Barat (TOT), *ketiga* *Bahtsul Masail* yang dilakukan PWNU, *keempat*, pengajian *Lailatul Ijtima*, *kelima*, kajian-kajian kekinian, *keenam*, menyuarakan antikorupsi, dan *ketujuh*, turut berperan dalam pesta demokrasi.
3. Strategi yang digunakan NU dalam upaya pendidikan demokrasi ditempuh melalui strategi formal dan nonformal.

4. Media yang digunakan dalam upaya pendidikan demokrasi melalui organ PWNU sendiri yang dibantu badan otonom dan lajnah dibawahnya, media internet dalam hal ini melalui website nu, dan penerbitan media cetak yakni pembuatan buku, penerjemahan untuk kemudian ditransformasikan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamidy,dkk.2008. *Sarung dan Demokrasi dari NU untuk Peradaban Indonesia*. Khalista:Surabaya.
- Anwar, Ali. 2004. *Avonturisme NU (Menjajaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdliyin)*. Humaniora Utama Press:Bandung.
- Arikunto,Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Rieneke Cipta:Jakarta. Penerbit Alfabeta:Bandung
- Fachrudin, Fuad. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Pustaka Alfabet:Jakarta.
- Karim, Abdul Ghafar. 1995. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Komala & Syaifullah. 2008. *Memahami Pendidikan Kewarganegaraan*.Lab PKn UPI: Bandung.
- Nasution.S.1996. *Metodologi Penelitian Natural Kualitatif*. Transito : Bandung.
- Sapriya. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Lab PKn UPI:Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*
- Winarno.2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Bumi Aksara : Jakarta
- Wuryan, Sri & Syaifullah. 2006. *Ilmu Kewarganegaraan (civic)*.Lab PKn UPI:Bandung
- Zamroni.2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Kultural*. Gavin Kalam Utama:Yogyakarta.
- Zamroni. 2002. *Demokrasi dalam Masa Transisi*. Orasi Ilmiah di Universitas Negeri Yogyakarta : Tidak diterbitkan
- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. 2009. *Materi TOT*. Tidak diterbitkan
- PBNU.2010. *Hasil-Hasil Muktamar 32*. PBNU:Jakarta.